

**MAKALAH PENELITIAN**  
**“KETERKAITAN PANCASILA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SUATU**  
**ORGANISASI DI DAERAH KABUPATEN SUBANG”**

*Makalah ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila  
yang diampu oleh :*

**Santi Purwanti, S.H., M.Kom.**



Disusun Oleh:

Kelompok 4 kelas 1 Reg B

1	Adam Faturachman	D1A240046
2	Andre Wibowo	D1A240042
3	Arrafly Aziz Saputra	D1A240028
4	M. Arif Amrullah	D1A240040
5	Ramdan Prayitno	D1A240032

**JURUSAN SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS SUBANG**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah Pendidikan Pancasila dengan Judul **“KETERKAITAN PANCASILA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SUATU ORGANISASI DI DAERAH SUBANG”** Dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Purwanti, S.H., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman – teman yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data dalam pembuatan makalah ini.

Harapan penulis semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan makalah ini.

Subang, November 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 TUJUAN DAN MANFAAT .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>2.1 PENGERTIAN PANCASILA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4 PERKEMBANGAN PANCASILA DALAM ERA TEKNOLOGI     INFORMASI .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE SATU DENGAN TEKNOLOGI     INFORMASI DI ORGANISASI (BAZNAS) .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE DUA DENGAN TEKNOLOGI     INFORMASI DI ORGANISASI (PENGADILAN NEGERI SUBANG).....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE TIGA DENGAN TEKNOLOGI     INFORMASI DI ORGANISASI (PARPOL GOLKAR).....</b>	<b>15</b>
<b>3.4 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE EMPAT DENGAN TEKNOLOGI     INFORMASI DI ORGANISASI (DPRD KABUPATEN SUBANG).....</b>	<b>17</b>
<b>3.5 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE LIMA DENGAN TEKNOLOGI     INFORMASI DI ORGANISASI (DINAS SOSIAL SUBANG) .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>4.1 KESIMPULAN.....</b>	<b>22</b>
<b>4.2 SARAN.....</b>	<b>23</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara tentunya Pancasila harus menjadi acuan Negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang.

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentunya sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat.

Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia.

Dari faktor-faktor tersebutlah dibutuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat di era globalisasi.

Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat dalam masyarakat adalah teknologi informasi. Hampir semua orang sependapat bahwa teknologi informasi telah, sedang dan akan merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik dan buruk, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Sebagai teknologi, kedua sisi tersebut keberadaannya sangat tergantung pada pemakainya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, jika dikaitkan dengan ideologi yang dianut Indonesia yakni Pancasila. Maka akan muncul pertanyaan apakah nilai-nilai dalam Pancasila yang selama ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia terpengaruh perkembangan teknologi informasi? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, tidak

serta merta dapat dijawab dengan jawaban terpengaruh atau tidak terpengaruh. Walaupun jawaban tersebut sudah disertai dengan alasannya.

Melihat kenyataan dalam masyarakat, sebenarnya bukan pancasila yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi melainkan masyarakat itu sendiri. Memberi pengaruh baik atau buruk terhadap pancasila tergantung bagaimana masyarakat sebagai penganut ideologi pancasila menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti informasi mengenai gaya hidup bangsa barat yang notabene gaya hidup bangsa barat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan nilai-nilai luhur pancasila dalam masyarakat terkikis bahkan habis tergilas budaya barat yang berkembang.

Sebagai pedoman etika dalam penggunaan teknologi. Pancasila memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Sebagai landasan untuk mengembangkan IPTEK yang tidak bertentangan dengan Pancasila. IPTEK harus sejalan dengan budaya dan ideologi bangsa. Sebagai sumber motivasi untuk mengembangkan IPTEK nasional. IPTEK harus didasari nilai-nilai etis Pancasila untuk mencerdaskan bangsa. Sebagai pedoman untuk meminimalisir penyalahgunaan IPTEK. Pancasila berisi nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Mufakat, serta Keadilan Sosial.

## **1.2 TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

#### **a. Memahami Konsep Pancasila dalam Konteks Teknologi Informasi**

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi di suatu organisasi.

#### **b. Menganalisis Pengaruh Pancasila terhadap Etika Teknologi Informasi**

Memaparkan bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, berperan dalam membentuk etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan organisasi.

c. Mengidentifikasi Keterkaitan Nilai Pancasila dengan Inovasi Teknologi Informasi

Mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat mendorong inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

d. Menggambarkan Tantangan dan Peluang

Membahas tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerapkan teknologi informasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta peluang yang dihadirkan melalui kolaborasi keduanya.

2. Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk:

a. Panduan Etis bagi Organisasi

Makalah ini memberikan pemahaman bagi organisasi tentang pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan yang melibatkan teknologi informasi, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan teknologi.

b. Peningkatan Budaya Organisasi

Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam penerapan teknologi informasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang berlandaskan pada kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

c. Membangun Kepercayaan Publik

Dengan mengedepankan etika yang berlandaskan Pancasila, organisasi dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi informasi yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

d. Peningkatan Produktivitas dan Inovasi

Penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan keadilan, dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif di dalam organisasi, yang pada akhirnya meningkatkan inovasi dalam penggunaan teknologi informasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 PENGERTIAN PANCASILA**

Pancasila adalah dasar ideologi dan filosofi negara Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditetapkan oleh pendiri bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai Pancasila beserta sumber-sumber relevan dari kajian akademik.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "Panca" yang berarti lima dan "Sila" yang berarti prinsip atau asas. Lima sila ini dirumuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai panduan utama dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Pancasila mencakup lima prinsip yang mewakili kesatuan antara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dasar ini kemudian diresmikan pada Pembukaan UUD 1945.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan "pancasila" memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu "panca" artinya "lima" "syila" vokal i pendek artinya "batu sendi", "alas", atau "dasar" "syila" vokal i panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh" Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "susila" yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata "pancasila" yang dimaksudkan adalah istilah "Panca Syiila" dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal "berbatu sendi lima" atau secara harfiah "dasar yang memiliki lima unsur". Adapun istilah "Panca Syiila" dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Dalam kajian akademik, Pancasila sering kali dianggap sebagai landasan filosofi yang berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memberikan dasar yang kuat untuk toleransi beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai contoh, dalam kajian mengenai hubungan agama dan negara, Pancasila

diakui sebagai dasar yang menegaskan pentingnya kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari identitas Indonesia.

Pancasila menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih perlu ditanamkan dengan lebih kuat dalam kehidupan generasi muda untuk mencegah pengaruh negatif dari globalisasi dan radikalisme. Untuk itu, pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah serta dalam kebijakan publik dinilai penting agar nilai-nilai ini dapat terus dilestarikan dan diimplementasikan secara efektif.

Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan prinsip tersendiri yang menjadi dasar dalam tata kelola negara serta kehidupan sosial dan politik Indonesia:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini menekankan pentingnya nilai religius dan menghormati keyakinan pada Tuhan sesuai agama masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua mengajak bangsa Indonesia untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati martabat dan keadilan sosial.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga menegaskan pentingnya kesatuan dalam keberagaman dan semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan pada demokrasi yang bermusyawarah, di mana keputusan diambil berdasarkan suara bersama.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan prinsip keadilan sosial yang berusaha menghilangkan kesenjangan sosial dan memberikan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat.



## 2.2 PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaa UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam linea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukancalon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

### A. Pancasila Pra Kemerdekaan

Pancasila pra-kemerdekaan merujuk pada gagasan awal mengenai dasar-dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebelum Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemikiran mengenai dasar negara ini muncul dalam masa persiapan kemerdekaan dan diperbincangkan di badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

#### 1) Pembentukan BPUPKI dan Sidang Pertama

BPUPKI didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada bulan Maret 1945 sebagai upaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk membahas dasar dan konsep negara yang akan didirikan. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni

1945, mencakup pembahasan dasar-dasar ideologi dan prinsip yang dapat dijadikan pondasi negara baru.

## 2) Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dan dikenal sebagai momen lahirnya konsep Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan lima prinsip dasar yang ia sebut "Pancasila" sebagai dasar negara. Kelima prinsip itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

## 3) Perubahan dan Perumusan Kembali oleh Panitia Sembilan

Setelah pidato Soekarno, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Agus Salim. Panitia ini bertugas merumuskan dan menyempurnakan konsep dasar negara yang sesuai dengan konsensus berbagai pihak, terutama karena perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyusun Piagam Jakarta, yang berisi lima prinsip yang disepakati sebagai dasar negara. Dalam versi Piagam Jakarta ini, sila pertama berbunyi, "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Versi ini sempat menimbulkan perdebatan, tetapi akhirnya sila pertama disempurnakan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menciptakan kesatuan di antara berbagai kelompok agama di Indonesia pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan.

## B. Pancasila Era Kemerdekaan

Pada era kemerdekaan, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Proses ini dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan harapan para pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang berdaulat dan harmonis dalam keberagaman.

### 1) Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara (18 Agustus 1945)

Pada sidang PPKI, yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam teks Pembukaan UUD 1945. Dalam pengesahan ini, lima sila Pancasila ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengesahan ini juga menghapuskan "Piagam Jakarta" yang sebelumnya mencantumkan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam sila pertama. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesatuan di antara berbagai kelompok etnis dan agama, dan mencerminkan keputusan untuk membentuk negara yang tidak berdasarkan agama tertentu.

### 2) Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Landasan Hukum

Setelah kemerdekaan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi landasan moral dan norma yang harus ditaati dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Pemerintahan Soekarno, khususnya, menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dan semangat persatuan di tengah keberagaman. Kajian akademis menunjukkan bahwa Pancasila

menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan, dan toleransi antaragama.

### 3) Implementasi Pancasila dalam Pemerintahan Soekarno

Pancasila dijadikan pedoman dalam berbagai kebijakan politik dan ekonomi. Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi harus menjadi realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno sering menegaskan pentingnya Pancasila sebagai alat persatuan nasional, terutama pada masa-masa sulit menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Pemerintahannya mencanangkan "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai upaya untuk menyatukan tiga kekuatan ideologis besar di Indonesia, meskipun konsep ini menimbulkan perdebatan dan tidak berlangsung lama.

## 2.3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Secara Bahasa, Ideologi dari Bahasa Yunani yaitu kata “eidos” dan “Logos”. Eidos artinya ide, gagasan, cita-cita atau konsep. Dan logos yaitu ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide, gagasan, atau cita-cita tertentu. Dan menurut makna yang terkandung berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau gagasan yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham. Adapun beberapa para ahli memaknai atau mendefinisikan seperti Mubyarto mendefinisikan bahwa ideologi ialah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol masyarakat atau bangsa yang menjadi tujuan masyarakat atau bangsa itu. Oesman dan Alfian mendefinisikan bahwa ideologi serangkaian nilai atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam dimiliki dipegang suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan pandangan hidup mereka. Dari beberapa pendapat di atas saya menyimpulkan bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan-gagasan, nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya untuk kita jadikan dasar untuk tercapainya tujuan yang ditentukan.

### 1. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

#### a. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang baru dapat menerima pemikiran –pemikiran baru tentang nilai dasar yang

terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter). Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat yaitu: *'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'*.

Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menjadi penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan pengembangan zaman. Suatu ideologi yang dalam kenyataan tidak mampu lagi menerima pemikiran-pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demikian disebut ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya menyatakan ideologinya demokratis.

b. Pancasila Sebagai Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup digunakan oleh sejumlah negara di dunia, ideologi ini bersifat mutlak, dogmatis, dan apriori. Dogmatis berarti percaya akan sesuatu keadaan tanpa data yang valid, sementara apriori artinya berprasangka terlebih dahulu mengenai suatu keadaan.

Pengertian ideologi tertutup dikutip dari paradigma baru pendidikan pancasila (2016) oleh Winarno, ideologi tertutup adalah ajaran, pandangan dunia, atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial sebagai suatu kebenaran. Dalam ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah latar belakang, tujuan, nilai, atau karakteristik negara itu sendiri. Menurut Maimun dalam jurnal meredam ideologi radikal di Indonesia melalui praktik keteladanan nilai Pancasila (2015), sistem ideologi tertutup diciptakan pemerintah atau kelompok elite suatu negara, nilai, ajaran, atau pandangan yang menjadi landasan ideologi ini tidak berasal dari masyarakat, melainkan dari pokok pikiran serta keinginan kaum elite.

Ciri-ciri ideologi tertutup

- Merupakan cita – cita suatu kelompok orang untuk mengubah atau memperbaharui masyarakat
- Atas nama ideologi, tindakan pengorbanan dibebankan pada masyarakat
- Isinya tidak hanya soal nilai dan cita-cita tertentu, tetapi juga memuat tuntutan konkret dan operasional yang keras.

## **2.4 PERKEMBANGAN PANCASILA DALAM ERA TEKNOLOGI INFORMASI**

Perkembangan teknologi informasi dapat memengaruhi penerapan nilai-nilai

Pancasila dalam beberapa hal, yaitu :

### **1. Landasan pengembangan IPTEK**

Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh buruk.

### **2. Panduan dalam dunia digital**

Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan untuk menavigasi dunia digital yang kompleks.

### **3. Media sosial sebagai sarana edukasi**

Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan sebagai sarana edukasi.

### **4. Filter kemajuan teknologi**

Pancasila dapat menjadi filter agar Indonesia tidak mengalami disorientasi di era globalisasi teknologi dan informasi.

### **5. Menjaga integritas moral**

Teknologi dapat mendukung nilai-nilai Pancasila dalam menjaga integritas moral dan memperkuat kebersamaan dalam masyarakat digital.

### **6. Membangun kesadaran nasionalisme**

Perlindungan data pribadi, pembangunan karakter bangsa, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membangun kesadaran nasionalisme yang kuat.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE SATU DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ORGANISASI (BAZNAS)**

Keterkaitan Pancasila butir pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, dengan Teknologi Informasi (TI) di organisasi, khususnya BAZNAS Subang, dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang mendasari penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam penggunaan teknologi. Berikut adalah penjelasannya yang disertai contoh konkret dalam penerapan TI di BAZNAS Subang:

##### **1. Etika Penggunaan Teknologi**

Butir pertama Pancasila mengajarkan pentingnya menjalankan setiap tindakan dengan landasan etika yang berpedoman pada kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks Teknologi Informasi di BAZNAS Subang:

- a. Penggunaan TI, seperti sistem pengelolaan zakat online, harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas, sesuai dengan nilai-nilai agama. Misalnya, aplikasi zakat online harus memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai penggunaan dana yang terkumpul.
- b. Pengelolaan data muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) harus dilakukan dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, mengingat pentingnya menjaga amanah dan bertanggung jawab kepada Tuhan serta masyarakat.

##### **1) Contoh di BAZNAS Subang:**

- a) BAZNAS Subang menggunakan sistem informasi untuk memudahkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Dalam penerapannya, sistem ini harus memastikan data pribadi tidak disalahgunakan, sesuai dengan etika yang diajarkan oleh agama.

##### **2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Teknologi**

Ketuhanan yang Maha Esa juga mencerminkan bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Teknologi dapat membantu menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan dan distribusi zakat.

Dengan menggunakan TI, BAZNAS Subang dapat menyediakan laporan yang akurat mengenai penerimaan dan penyaluran zakat, sehingga para donatur (muzaki) dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan untuk membantu yang membutuhkan.

a. Contoh di BAZNAS Subang:

Aplikasi berbasis TI yang digunakan BAZNAS Subang untuk pelaporan keuangan publik dapat menjadi wujud nyata dari akuntabilitas organisasi. Setiap transaksi tercatat secara otomatis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan.

3. Pemanfaatan Teknologi untuk Kemaslahatan Umum

Butir pertama Pancasila menekankan bahwa setiap tindakan harus berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan umum, sesuai dengan perintah Tuhan. Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile zakat, BAZNAS Subang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

a. Contoh di BAZNAS Subang :

BAZNAS Subang menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile untuk memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakatnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dengan teknologi, BAZNAS juga dapat menyalurkan bantuan kepada mustahik secara lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan data kebutuhan yang terkini.

4. Inovasi Teknologi yang Berlandaskan Nilai Agama

Nilai *Ketuhanan yang Maha Esa* dalam Pancasila juga mengajarkan bahwa setiap inovasi, termasuk dalam teknologi, harus memiliki tujuan yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Teknologi di BAZNAS Subang bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat semangat keagamaan dan sosial, seperti mempromosikan nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas melalui platform digital.



a. Contoh di BAZNAS Subang :

BAZNAS Subang dapat menggunakan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya berzakat, infak, dan sedekah, sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan cara ini, teknologi menjadi alat untuk mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai keagamaan, sejalan dengan butir pertama Pancasila.

### **3.2 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE DUA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ORGANISASI (PENGADILAN NEGERI SUBANG)**

Pancasila, terutama sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab," memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penerapan Teknologi Informasi (TI) di organisasi Pengadilan Negeri, termasuk di Kabupaten Subang. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlakuan yang beradab dalam hubungan antar manusia.

Dalam konteks Teknologi Informasi di pengadilan, keterkaitan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting:

1. Aksesibilitas dan Keadilan dalam Proses Hukum :

Teknologi Informasi memungkinkan akses yang lebih luas dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum dan keputusan pengadilan. Dengan demikian, TI membantu mewujudkan keadilan yang lebih merata dan transparan, sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil. Sistem e-court dan aplikasi pengadilan online, misalnya, memastikan bahwa masyarakat Subang dapat mengakses layanan hukum tanpa diskriminasi.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas :

TI memungkinkan proses di pengadilan menjadi lebih transparan dan dapat diakses secara daring. Ini memastikan bahwa semua pihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, diperlakukan secara adil dan tidak ada penyelewengan yang tertutup. Ini juga mencerminkan perilaku yang beradab dalam penanganan kasus hukum.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia :

Teknologi Informasi di pengadilan juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu dalam proses hukum. Contohnya adalah pengelolaan data yang aman dan privasi informasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum, yang

merupakan bagian dari perilaku yang beradab dan menghormati hak-hak kemanusiaan.

4. Efisiensi dalam Pelayanan Publik :

Implementasi TI meningkatkan efisiensi proses hukum, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, dan memperbaiki kualitas layanan publik di pengadilan. Ini juga merupakan bagian dari tindakan beradab, di mana masyarakat dilayani dengan cepat dan profesional.

Dengan menerapkan Teknologi Informasi yang mendukung prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab, Pengadilan Negeri di Subang dapat meningkatkan pelayanan hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil untuk masyarakat.

**Kesimpulan :**

Penerapan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Subang sangat mendukung sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dengan meningkatkan aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan perlindungan hak asasi dalam proses hukum.

### **3.3 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE TIGA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ORGANISASI (PARPOL GOLKAR)**

Dalam konteks partai politik GOLKAR yang beroperasi di Kabupaten Subang, nilai "Persatuan Indonesia" dalam Pancasila memiliki relevansi penting terhadap penggunaan teknologi informasi (TI) untuk mendukung visi dan misi partai dalam membangun kesatuan serta sinergi di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa keterkaitan utama antara prinsip "Persatuan Indonesia" dan teknologi informasi dalam organisasi GOLKAR :

1. Memperkuat Kolaborasi dan Komunikasi Antar Anggota

Teknologi informasi membantu GOLKAR Kabupaten Subang mengintegrasikan komunikasi antar anggota partai yang tersebar di berbagai wilayah, baik di tingkat kabupaten hingga desa. Dengan penggunaan platform TI seperti aplikasi pesan instan, situs web internal, atau media sosial partai, komunikasi internal menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Prinsip persatuan terwujud melalui sinergi antar anggota yang bekerja untuk tujuan yang sama tanpa batasan geografis.

## 2. Menyatukan Keberagaman dalam Organisasi

Partai GOLKAR dikenal sebagai partai dengan anggota yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, partai dapat mengakomodasi keragaman ini dan mempromosikan nilai persatuan. Platform diskusi daring, webinar, dan rapat virtual memungkinkan anggota dengan pandangan yang berbeda untuk berdialog dan berbagi gagasan tanpa adanya hambatan fisik, sehingga tercipta kesatuan dalam keragaman.

## 3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Partai

Prinsip "Persatuan Indonesia" juga dapat tercermin dalam upaya partai untuk merangkul masyarakat dan mendengar aspirasi mereka melalui teknologi informasi. GOLKAR dapat memanfaatkan media digital seperti survei online, forum interaktif, atau aplikasi partisipatif untuk mendengarkan masukan dari masyarakat di Subang. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi kebijakan, partai dapat memperkuat persatuan dengan mendengarkan berbagai pandangan dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang inklusif.

## 4. Membangun Persatuan melalui Kampanye Digital

Dalam era digital, teknologi informasi memungkinkan partai politik untuk menyebarkan pesan dan program-program partai dengan cepat dan efisien melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya. Nilai "Persatuan Indonesia" tercermin dalam kampanye digital GOLKAR yang dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat di Subang untuk mendukung tujuan yang sama, yaitu membangun kesejahteraan daerah melalui kerja sama dan solidaritas. Teknologi informasi juga memungkinkan partai untuk mencapai basis pemilih yang lebih luas, memperkuat persatuan dengan menghubungkan anggota dan pendukung dari berbagai latar belakang.

## 5. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi GOLKAR juga berperan dalam menciptakan transparansi, yang merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat persatuan. Sistem informasi yang transparan, seperti pelaporan keuangan digital atau platform pengaduan publik, memungkinkan anggota dan masyarakat Subang untuk melihat kinerja partai secara terbuka, sehingga kepercayaan dapat terjaga dan persatuan tetap solid.

### **Kesimpulan :**

Dalam organisasi Partai Politik GOLKAR di Kabupaten Subang, nilai "Persatuan Indonesia" dapat diterjemahkan ke dalam berbagai aspek teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi secara efektif, GOLKAR dapat memperkuat komunikasi internal, menyatukan keberagaman, melibatkan masyarakat dalam proses politik, serta meningkatkan transparansi. Dengan demikian, teknologi informasi berperan penting dalam mendukung visi GOLKAR untuk menciptakan persatuan yang kuat di Kabupaten Subang, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

### **3.4 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE EMPAT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ORGANISASI (DPRD KABUPATEN SUBANG)**

Butir keempat Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan, musyawarah, dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kabupaten Subang, prinsip ini dapat dikaitkan erat dengan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara nilai "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan penggunaan teknologi informasi di DPR:

#### **1. Memfasilitasi Permusyawaratan dan Musyawarah secara Daring**

Prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Teknologi informasi membantu DPR Kabupaten Subang menyelenggarakan musyawarah secara lebih mudah dan efektif melalui platform rapat daring (seperti Zoom atau Google Meet). Dengan TI, anggota DPR yang tersebar dapat berpartisipasi secara aktif tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan serta membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan efisien.

#### **2. Meningkatkan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Dalam semangat hikmat kebijaksanaan, transparansi adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik. Teknologi informasi memungkinkan DPR untuk meningkatkan transparansi dalam proses legislasi, seperti membuat jadwal rapat, hasil musyawarah, serta keputusan yang diambil dapat diakses secara publik melalui website atau aplikasi. Dengan demikian, masyarakat

Subang dapat memantau proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa musyawarah dilakukan dengan bijaksana dan demokratis.

### 3. Memperluas Partisipasi Publik dalam Permusyawaratan

Prinsip musyawarah dan perwakilan dalam Pancasila juga terkait dengan pentingnya mendengar aspirasi rakyat. Dengan bantuan teknologi informasi, DPR Kabupaten Subang dapat melibatkan masyarakat lebih luas dalam musyawarah melalui survei online, forum diskusi digital, dan aplikasi partisipatif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan mereka terkait kebijakan publik yang sedang dibahas oleh DPR. Hal ini memperkuat keterwakilan dan memungkinkan proses legislasi yang lebih partisipatif, sesuai dengan nilai kerakyatan.

### 4. Mengoptimalkan Sistem e-Representasi dan e-Government

Teknologi informasi memungkinkan penerapan sistem e-Representasi, di mana perwakilan rakyat di DPR Kabupaten Subang dapat menyampaikan laporan, mendengar keluhan masyarakat, atau memberikan tanggapan melalui platform digital seperti media sosial, email, atau aplikasi khusus pemerintahan. Dengan demikian, peran perwakilan rakyat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat prinsip perwakilan yang bertanggung jawab.

### 5. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data dan Analisis Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan DPR Kabupaten Subang untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan didasarkan pada data yang akurat. Sistem informasi berbasis data, seperti aplikasi untuk mengelola statistik sosial-ekonomi dan aspirasi masyarakat, dapat membantu anggota DPR membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, prinsip "hikmat kebijaksanaan" dapat diterapkan lebih baik melalui penggunaan teknologi yang menyediakan data real-time dan analisis yang mendalam.

### 6. Mempercepat Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Dalam konteks perwakilan, teknologi informasi memungkinkan anggota DPR untuk mengelola aspirasi rakyat dengan lebih cepat dan efisien. Sistem pengelolaan aspirasi berbasis TI (misalnya melalui aplikasi pengaduan publik atau portal aspirasi warga) memungkinkan masyarakat di Kabupaten Subang untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau ide secara langsung, dan anggota DPR dapat merespons secara lebih efektif. Hal ini meningkatkan peran wakil rakyat dalam mewakili kepentingan masyarakat secara aktif.

### **Kesimpulan :**

Nilai Pancasila butir keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dapat diterapkan secara efektif di organisasi DPR Kabupaten Subang melalui pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memperkuat musyawarah, meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan data. Dengan teknologi informasi, DPR Kabupaten Subang dapat menjalankan prinsip kerakyatan dan perwakilan yang lebih responsif, inklusif, dan efisien.

### **3.5 KETERKAITAN PANCASILA BUTIR KE LIMA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI ORGANISASI (DINAS SOSIAL SUBANG)**

Butir kelima Pancasila, "Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya distribusi keadilan sosial secara merata untuk semua lapisan masyarakat. Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Subang, teknologi informasi (TI) memainkan peran kunci dalam mendukung pencapaian keadilan sosial melalui program-program kesejahteraan sosial yang lebih transparan, tepat sasaran, dan inklusif. Berikut adalah beberapa keterkaitan utama antara nilai "Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan penggunaan teknologi informasi di Dinas Sosial Kabupaten Subang:

#### **1. Meningkatkan Akurasi dan Keadilan dalam Distribusi Bantuan Sosial**

Salah satu tujuan Dinas Sosial adalah memastikan bantuan sosial dapat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan teknologi informasi, Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat menggunakan sistem informasi penerima manfaat yang berbasis data. Melalui sistem ini, data keluarga penerima manfaat dapat diolah secara lebih akurat berdasarkan kebutuhan nyata, seperti data ekonomi dan demografi. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan, memastikan bahwa keadilan sosial tercapai dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

## 2. Mempercepat Proses Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi proses pengajuan bantuan melalui platform daring atau aplikasi. Warga Subang yang membutuhkan bantuan sosial dapat mengajukan permohonan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Dengan demikian, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga memudahkan akses ke program-program sosial. Ini menciptakan keadilan dalam akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

## 3. Meningkatkan Transparansi dalam Pelaksanaan Program Sosial

Dengan penggunaan TI, Dinas Sosial dapat meningkatkan transparansi terkait penyaluran bantuan, alokasi anggaran, serta kriteria penerima. Laporan penyaluran bantuan dapat dipantau oleh publik melalui sistem daring, sehingga masyarakat dapat memverifikasi apakah distribusi bantuan dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Hal ini berkontribusi dalam menjaga keadilan, karena publik dapat memastikan bahwa tidak ada ketimpangan atau penyalahgunaan dalam program-program kesejahteraan.

## 4. Pemetaan Data Sosial yang Akurat untuk Mewujudkan Keadilan

Penggunaan teknologi informasi memungkinkan Dinas Sosial untuk melakukan pemetaan data sosial yang lebih akurat dengan menggunakan sistem GIS (Geographic Information System) atau platform data terpadu. Dengan data tersebut, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi atau kelompok rentan tertentu. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang lebih tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial, mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata.

## 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Sosial

Teknologi informasi juga memungkinkan masyarakat Subang untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait program-program sosial melalui platform pengaduan publik online. Dengan adanya akses ini, masyarakat dapat melaporkan penyimpangan atau memberikan saran untuk peningkatan pelayanan sosial. Ini menciptakan keadilan partisipatif,

di mana semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses sosial yang adil dan transparan.

#### 6. Memastikan Keadilan Akses bagi Semua Lapisan Masyarakat

Dengan teknologi informasi, Dinas Sosial dapat mengembangkan aplikasi layanan sosial yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, atau warga di daerah terpencil. Teknologi seperti SMS gateway atau aplikasi mobile memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses internet pun tetap dapat menerima informasi atau mengajukan bantuan. Hal ini memastikan bahwa keadilan sosial tercapai dengan memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat Subang tanpa diskriminasi.

#### 7. Pengelolaan Data Penerima Bantuan Secara Berkelanjutan

Dengan teknologi informasi, Dinas Sosial dapat mengelola database penerima manfaat secara lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan pembaruan data secara berkala, program bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini sehingga tetap relevan dan adil. Dengan begitu, program bantuan tidak hanya menjangkau penerima yang berhak tetapi juga mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi.

#### **Kesimpulan :**

Butir kelima Pancasila, "**Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**," dapat diwujudkan di Dinas Sosial Kabupaten Subang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif. Teknologi informasi membantu menciptakan proses yang lebih efisien, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses ke program kesejahteraan, sehingga keadilan sosial dapat dicapai secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Subang.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Pengelolaan organisasi dalam era digital saat ini semakin dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan proses komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, penerapan teknologi informasi juga harus sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang berakar pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

1. **Keterkaitan Pancasila dan Teknologi Informasi:** Teknologi informasi berperan penting dalam pengelolaan organisasi modern, namun penerapan teknologi ini harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Pengelolaan organisasi berbasis teknologi tetap harus berpegang pada etika dan nilai moral Pancasila untuk mencegah efek negatif, seperti penyalahgunaan informasi atau pengabaian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam proses manajemen.
2. **Pancasila Sebagai Filter Budaya Teknologi:** Teknologi informasi juga membuka arus informasi global yang bisa memengaruhi budaya organisasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa pengaruh budaya asing yang masuk melalui teknologi informasi tidak merusak identitas nasional, dan nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengelolaan organisasi.
3. **Tantangan Pengelolaan Organisasi di Era Digital:** Tantangan utama adalah bagaimana memadukan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi dengan tetap menjaga integritas nilai-nilai Pancasila. Generasi muda dan para profesional di organisasi harus dididik dan dibimbing agar tidak terjebak dalam pemikiran pragmatisme teknologi yang mengabaikan prinsip-prinsip moral dan sosial yang dipegang teguh oleh Pancasila.

## 4.2 SARAN

1. **Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Pancasila** : Pendidikan Pancasila harus terus diperkuat di semua level, terutama di lingkungan organisasi, agar setiap individu di dalamnya memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari yang menggunakan teknologi informasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, seminar, atau integrasi dalam program pengembangan sumber daya manusia di organisasi.
2. **Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Berbasis Pancasila** : Organisasi di Indonesia perlu mengembangkan dan menerapkan sistem teknologi informasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip etis seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Pengembangan sistem ini akan membantu organisasi mempertahankan identitas nasional di tengah kemajuan teknologi.
3. **Pengawasan Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi** : Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan teknologi informasi di organisasi untuk memastikan bahwa penerapan teknologi tidak melanggar nilai-nilai Pancasila. Organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas terkait etika digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat atau mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
4. **Penguatan Karakter Berbasis Pancasila dalam Generasi Muda** : Generasi muda sebagai pengguna utama teknologi informasi harus dikuatkan dalam aspek moral dan karakter melalui pendidikan berbasis Pancasila. Dengan demikian, mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakan di dunia maya maupun nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Argadinata, H., & Gunawan, I. (2019, December). The leadership of Pancasila in education: Foundation for strengthening student characters in the industrial revolution era 4.0. In *The 4th International Conference on Education and Management (COEMA 2019)* (pp. 5-7). Atlantis Press.
- Gunawan, A. (2021). Landasan epistemologis filsafat pancasila.
- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 229-238.
- Elizabeth, V. (2022). Makna Keterbukaan Dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. *Perspektif Hukum*, 80-108.
- Pranarka, A. M. W. (1987). Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Analisis CSIS*, 16(4), 406-406.
- Ashari, F. A., Najicha, F. U., & SH, M. (2023). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Era Digital. *Research gate*, 4(1), 2-15.
- Gunawan, R., Aulia, S., Supeno, H., Wijanarko, A., Uwiringiyimana, J. P., & Mahayana, D. (2021). Adiksi media sosial dan gadget bagi pengguna internet di indonesia. *Techno-Socio Ekonomika*, 14(1), 1-14.
- Silva, S. D. F., & Glorino, M. (2021). Challenges of Pancasila Ideology in the Era of Industrial Revolution 4.0: Case Study of Generation Z and Millennials.
- <https://journal.ummat.ac.id/journals/10/articles/12987/submission/review/12987-42429-1-RV.doc>
- <https://kabsubang.baznas.go.id/news-show/Agar-Lebih-Di-Kenal-Masyarakat-BAZNAS-Kabupaten-Subang-Lakukan-Sosialisasi-Ke-Setiap-Kecamatan/10606>
- [https://www.academia.edu/23173812/MAKALAH\\_KETERKAITAN\\_TEKNOLOGI\\_INF ORMASI\\_DENGAN\\_SILA\\_PERSATUAN\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/23173812/MAKALAH_KETERKAITAN_TEKNOLOGI_INF ORMASI_DENGAN_SILA_PERSATUAN_INDONESIA)